

Evaluasi Program Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) pada Desa Bangah Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo

Oleh:

Amelia Vega Novitasari

222020100107

Dosen Pembimbing:

Ilmi Usrotin Choiriyah

Program Studi Administrasi Publik
Universitas Muhammadiyah Sidoarjo

Mei, 2026



Pendahuluan

Tata kelola pemerintahan yang baik menuntut transparansi, akuntabilitas, dan penggunaan teknologi informasi. Pemerintah Indonesia melalui e-government dan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) mendorong pemanfaatan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) untuk mengintegrasikan data perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pelaporan, dan evaluasi pembangunan daerah. Di Jawa Timur, SIPD diterapkan hingga tingkat kabupaten, kecamatan, dan desa.

Di Desa Bangah, Kecamatan Gedangan, SIPD membantu pengelolaan keuangan dan pembangunan desa, mulai dari Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes), APBDDes, hingga pelaksanaan program fisik dan pemberdayaan masyarakat. Sistem ini memfasilitasi pencatatan pendapatan desa, alokasi belanja, serta realisasi kegiatan secara elektronik, sekaligus menjadi sarana koordinasi antar level pemerintahan. Meskipun implementasi SIPD di Desa Bangah sudah berjalan, terdapat kendala seperti keterbatasan SDM operator, SOP yang belum seragam, serta infrastruktur internet yang belum stabil.

Keberadaan SIPD di Desa Bangah memiliki manfaat strategis, termasuk meningkatkan transparansi pengelolaan anggaran, mempercepat administrasi, dan menyediakan data untuk pengambilan keputusan berbasis informasi. Namun, gap antara harapan dan realitas lapangan membuat sistem ini masih perlu penguatan, khususnya dalam hal kapasitas operator, SOP, dan kelengkapan data. Fenomena ini menarik untuk diteliti karena penerapan SIPD belum sepenuhnya mendukung tata kelola desa yang transparan, akuntabel, dan berbasis data, meskipun sudah memberikan kontribusi positif pada pembangunan fisik dan pemberdayaan masyarakat.

Pendahuluan

Berdasarkan data APBDes Desa Bangah Tahun 2025, total pendapatan desa mencapai Rp2,94 miliar, dengan sumber utama dari Dana Desa, Alokasi Dana Desa, dan Pendapatan Asli Desa. Total belanja desa lebih tinggi, yaitu Rp3,29 miliar, dengan alokasi terbesar untuk pembangunan infrastruktur seperti balai desa, penguat jalan, dan plengsengan, serta program sosial seperti BLT, pemberdayaan masyarakat, dan pembinaan Karang Taruna. Kondisi ini menunjukkan fokus pemerintah desa pada perbaikan sarana publik sekaligus pemberdayaan masyarakat, namun belanja yang melebihi pendapatan menuntut pengelolaan keuangan yang cermat agar pembangunan lebih transparan, akuntabel, dan terukur melalui SIPD.

Tabel 1. APBDes Tahun 2025 Desa Bangah

No	Uraian	Jumlah (Rp)
A. PENDAPATAN DESA		
1	Pendapatan Asli Desa (PAD)	533.300.000,00
2	Dana Desa (DD)	379.200.000,00
3	Alokasi Dana Desa (ADD - DAU)	1.101.856.000,00
4	Alokasi Dana Desa (ADD - Bagi Hasil)	65.209.629,00
5	Bagi Hasil Pajak (BHP)	573.371.207,00
6	Bagi Hasil Retribusi (BHR)	24.185.781,00
7	Bantuan Kabupaten Umum	150.000.000,00
8	Bantuan Kabupaten Khusus	30.000.000,00
9	Pendapatan Lain-lain yang Sah	80.000.000,00
Total Pendapatan Desa		2.937.121.617,00
B. BELANJA DESA		
10	Bidang Pendidikan	100.000
11	Bidang Kesehatan	169.053.700
12	Pemeliharaan Pemakaman	9.080.000
13	Peninggian Jalan Paving Timur Balai RW 02	6.956.250
14	Peninggian Paving Gg. Gakam RT 16 RW 03	10.500.000
15	Peninggian Paving Jl. Mushollah Al Nurji RT 17 RW 03	15.125.250
16	Peninggian Paving Jl. Singojoyo V RT 19 RW 03	15.625.250
17	Peninggian Paving Gg. Wahid Hasyim RT 17 RW 03	7.392.000
18	Normalisasi Paving ke Makam Mbah Cokro RT 13 RW 02	29.600.000
19	Tutup Selokan P. Fazai RT 06 RW 01	3.500.000
20	Normalisasi Saluran Air Jl. Singojoyo III RT 18 RW 03	19.825.500
21	Normalisasi Saluran Air Jl. Singojoyo III RT 21 RW 04	8.650.500
22	Normalisasi Saluran Air U-Ditch Jl. Kayun RT 23 RW 04	19.600.000
23	Pembuatan Borem/ Penahan Jalan ke Gedangan	150.000.000
24	Plengsengan dan Pagar Lapangan Bola	124.655.750
25	Pembangunan Plengsengan Selatan Makam Mbah Cokro	189.014.172
26	Pembangunan Balai Desa	110.000.000
27	Pemutakhiran Data SDGs dan eHDW	4.950.000
28	Pembinaan Karang Taruna	5.000.000
29	Pembinaan LKMID	3.000.000
30	Pemberdayaan Perempuan	35.000.000
31	Kegiatan Pemasaran Produk Unggulan	71.654.031
32	Penanggulangan Covid-19	2.000.000
33	Penanggulangan Bencana Darurat dan Mendesak	71.654.031
34	Bantuan Langsung Tunai (BLT)	165.600.000
Total Belanja Desa		3.294.602.832,20

Sumber : Pemerintahan Desa Bangah

Pertanyaan Penelitian & Rumusan Masalah

- **Pertanyaan Penelitian**

1. Bagaimana kontribusi SIPD dalam mendukung pengelolaan administrasi keuangan desa di Desa Bangah?
2. Bagaimana peran SIPD dalam mendukung perencanaan, penganggaran, dan pelaporan pembangunan desa secara transparan dan akuntabel?
3. Apa kendala yang dihadapi dalam implementasi SIPD di Desa Bangah, baik dari sisi SDM, SOP, maupun infrastruktur teknologi?
4. Bagaimana dampak penggunaan SIPD terhadap efektivitas pengambilan keputusan berbasis data di tingkat desa?

- **Rumusan Masalah**

Untuk mengetahui efektivitas implementasi SIPD di Desa Bangah dalam mendukung pengelolaan administrasi keuangan dan pembangunan desa, termasuk kendala yang dihadapi serta dampaknya terhadap transparansi, akuntabilitas, dan pengambilan keputusan berbasis data.

Metode

Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu penelitian yang bertujuan menggambarkan fenomena secara sistematis, faktual, dan akurat berdasarkan kondisi nyata di lapangan. Pendekatan ini dipilih untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai kontribusi SIPD dalam pengelolaan administrasi keuangan dan pembangunan desa di Desa Bangah, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo.

Sumber Data Penelitian

Penelitian ini menggunakan dua jenis sumber data, yaitu:

- Data primer, diperoleh langsung melalui wawancara mendalam dengan Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kaur Perencanaan, dan Kepala Urusan Keuangan; observasi langsung proses input, pelaporan, dan penggunaan SIPD di kantor desa.
- Data sekunder, diperoleh dari dokumen resmi seperti APBDes, laporan realisasi pembangunan, bukti input SIPD, peraturan desa terkait implementasi SIPD, serta laporan pendukung lainnya yang mendukung analisis penelitian.

Metode

Populasi & Sampel

Populasi dalam penelitian ini mencakup seluruh pihak yang terlibat dalam pengelolaan administrasi keuangan dan pembangunan desa melalui SIPD di Desa Bangah. Hal ini meliputi Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kaur Perencanaan, Kepala Urusan Keuangan, operator SIPD, serta staf administrasi yang berperan dalam input dan pelaporan data pembangunan dan keuangan desa.

Sampel penelitian terdiri dari empat informan kunci yang dianggap paling memahami dan terlibat aktif dalam pengelolaan SIPD, yaitu: Kepala Desa Bangah, Sekretaris Desa, Kaur Perencanaan sebagai operator SIPD, dan Kepala Urusan Keuangan Desa Bangah.

Teknik Pengambilan Sampel

Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah purposive sampling, yaitu pemilihan informan secara sengaja berdasarkan kriteria tertentu yang mampu memberikan informasi mendalam dan relevan dengan fokus penelitian. Pemilihan ini memastikan bahwa data yang diperoleh mencerminkan kondisi nyata penggunaan SIPD di desa serta kontribusinya terhadap pengelolaan keuangan dan pembangunan.

Metode

Teknik Pengumpulan

Pengumpulan data dilakukan melalui tiga metode utama:

- Wawancara mendalam, langsung kepada informan kunci (Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kaur Perencanaan, dan Kepala Urusan Keuangan).
- Observasi lapangan, mengamati secara langsung proses input data, pelaporan, dan penggunaan SIPD di kantor desa.
- Dokumentasi, pengumpulan dokumen resmi berupa APBDes, laporan realisasi pembangunan, bukti input SIPD, serta peraturan dan pedoman desa terkait implementasi SIPD.

Teknik Analisis

Analisis data dilakukan dengan menggunakan model Miles dan Huberman (1992) yang terdiri atas tiga tahapan utama:

- Reduksi data, proses penyederhanaan pada informasi yang relevan dengan tujuan penelitian.
- Penyajian data, disajikan dalam bentuk naratif, tabel, atau bagan sesuai dengan empat komponen model CIPP (Context, Input, Process, Product) agar informasi tersusun sistematis dan mudah dipahami.
- Penarikan kesimpulan, interpretasi data berdasarkan temuan di lapangan untuk menghasilkan gambaran komprehensif mengenai efektivitas dan kontribusi SIPD.

Hasil dan Pembahasan (Context)

Evaluasi konteks penerapan SIPD di Desa Bangah, Kecamatan Gedangan, Sidoarjo menunjukkan bahwa sistem ini dibutuhkan untuk mendukung pengelolaan administrasi dan keuangan desa secara digital sesuai regulasi, dengan sasaran aparatur desa dan masyarakat sebagai penerima manfaat. SIPD mempermudah pencatatan APBDes, realisasi pembangunan, dan pelaporan keuangan, meningkatkan akuntabilitas, transparansi, koordinasi, dan kepercayaan publik. Namun, keterbatasan SDM terlatih, ketergantungan pada satu operator, fasilitas komputer terbatas, dan jaringan internet yang belum merata masih membatasi efektivitas sistem. Temuan ini sejalan dengan Karundeng, Mandey, dan Rindengan (2021), sehingga penguatan SDM, pelatihan teknis, pemerataan tugas, dan peningkatan sarana prasarana diperlukan agar SIPD berfungsi lebih optimal dan berkelanjutan.

Hasil dan Pembahasan (Input)

Evaluasi input SIPD di Desa Bangah, Kecamatan Gedangan, Sidoarjo mencakup prosedur program, SDM, anggaran, dan sarana prasarana. Prosedur dilakukan secara sistematis melalui perencanaan, persiapan, pelaksanaan, dan pengakhiran dengan dokumen RPJMDes, RKPDes, APBDes, dan Laporan Realisasi APBDes sebagai acuan. SDM utama sudah terlatih, namun keterlibatan perangkat desa lainnya masih terbatas sehingga pelatihan berkelanjutan diperlukan. Anggaran dan sarana seperti komputer dan jaringan internet telah disediakan, meski perlu peningkatan untuk optimalisasi. Hasil observasi dan wawancara menunjukkan SIPD berjalan sesuai jadwal, namun kendala teknis seperti jaringan belum stabil menegaskan bahwa keberhasilan sistem digital tergantung pada kesiapan prosedur, SDM, anggaran, dan infrastruktur, sejalan dengan temuan Wurara & Kimbal (2020) dan Ryas (2023).

Hasil dan Pembahasan (Process)

Proses evaluasi penerapan SIPD di Desa Bangah Gedangan, Sidoarjo menunjukkan bahwa pelaksanaan program berjalan sesuai perencanaan, meliputi input data RKPDDes, APBDDes, laporan realisasi anggaran, dan pelayanan administrasi publik, dengan tim operator SIPD yang terdiri dari Kaur Perencanaan dan Kaur Keuangan serta koordinasi rutin dengan Dinas PMD dan kecamatan. Monitoring dilakukan secara berjenjang oleh aparat desa, pendamping kecamatan, dan tim kabupaten, termasuk pengecekan data, validasi laporan, dan keterlibatan masyarakat melalui Musdes, sehingga meminimalkan kesalahan input dan meningkatkan transparansi. Hambatan utama meliputi keterbatasan jaringan internet, SDM yang belum merata, kesalahan input, dan pembaruan sistem, yang diatasi melalui pelatihan teknis, pendampingan intensif, koordinasi lintas pihak, dan penjadwalan lembur operator. Temuan ini sejalan dengan penelitian Karundeng, Mandey, & Rindengan (2021), Wurara & Kimbal (2020), dan Ryas (2023) yang menekankan pentingnya perencanaan jelas, koordinasi, penguatan kapasitas SDM, dan monitoring internal agar proses evaluasi program digital, termasuk SIPD, dapat berjalan optimal dan berkelanjutan.

Hasil dan Pembahasan (Product)

Evaluasi output SIPD di Desa Bangah Gedangan menunjukkan keberhasilan signifikan dalam digitalisasi pengelolaan keuangan desa, dengan seluruh data APBDes 2025 tercatat akurat dan real time, meningkatkan transparansi, akuntabilitas, efisiensi kerja, serta koordinasi aparatur desa. Pemanfaatan dan pemeliharaan meliputi akses informasi publik, partisipasi masyarakat, kapasitas aparatur, infrastruktur, dan keberlanjutan sistem melalui update data, backup, pelatihan, dan pendampingan teknis. Meski partisipasi masyarakat dan pelatihan aparatur masih perlu diperkuat, SIPD telah menjadi acuan utama perencanaan dan evaluasi program desa, sejalan dengan penelitian Sari & Pratama (2022) yang menekankan partisipasi masyarakat dan dukungan aparatur, serta Handayani & Nugroho (2021) yang menyoroti pentingnya SOP pemeliharaan, tim teknis, dan dukungan anggaran untuk keberlanjutan sistem.

No	Aspek Program	Hasil Utama	Dampak yang Dirasakan	Keterangan/ Status Pelaksanaan
1	Digitalisasi Pengelolaan Keuangan Desa (APBDes)	Seluruh data pendapatan, belanja, dan pembiayaan desa tahun 2025 telah diinput di aplikasi SIPD	Mempermudah pencatatan dan pelaporan keuangan desa secara real time dan akurat	Terimplementasi penuh sejak Januari 2025
2	Transparansi dan Akuntabilitas	Informasi APBDes, RKPDDes, dan laporan realisasi mudah diakses oleh perangkat desa dan masyarakat	Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan keuangan desa	Data tersedia dan terupdate di aplikasi SIPD
3	Efisiensi Administrasi Desa	Perangkat desa lebih cepat menyusun laporan semesteran dan tahunan berbasis SIPD	Menghemat waktu dan tenaga, serta mengurangi kesalahan pencatatan manual	Berjalan dengan baik, laporan semester 1 dan 2 selesai tepat waktu
4	Peningkatan Kapasitas SDM	Perangkat desa mulai terbiasa menggunakan sistem digital dan memahami standar laporan SIPD	Koordinasi antarbidang lebih tertata, komunikasi dengan kecamatan/kabupaten lebih lancar	Pelatihan lanjutan dan pendampingan masih diperlukan
5	Dampak Non-Fisik	Meningkatnya kesadaran pentingnya pengelolaan data berbasis digital dan keterbukaan informasi publik	Mendukung pengambilan kebijakan pembangunan desa yang lebih tepat sasaran	Proses pengembangan masih berlanjut untuk pelayanan administrasi lainnya

Temuan Penting Penelitian

Penelitian ini menemukan bahwa Sistem Informasi Profil Daerah (SIPD) telah diimplementasikan di Desa Bangah, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo pada tahun 2023 sebagai bagian dari upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas pengelolaan data pembangunan. SIPD berfungsi sebagai basis data terintegrasi yang mencakup delapan kelompok data utama yang bersumber dari seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Dalam pelaksanaannya, camat berperan sebagai otoritas tertinggi di tingkat wilayah, dibantu oleh staf yang memiliki kompetensi di bidang teknologi informasi untuk mengelola sistem tersebut. Penelitian ini juga menemukan bahwa proses perencanaan pembangunan telah melibatkan mekanisme Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang terhubung dengan sistem SIPD.

Namun demikian, temuan penting lainnya menunjukkan bahwa implementasi SIPD di Desa Bangah belum berjalan optimal. Hal ini disebabkan oleh belum meratanya aksesibilitas informasi publik antar desa, sehingga pemanfaatan data SIPD belum maksimal. Keterbatasan ini mengindikasikan adanya kesenjangan digital dan kelemahan dalam distribusi serta pemanfaatan informasi berbasis sistem. Dengan demikian, meskipun SIPD sudah diterapkan, efektivitasnya masih dipengaruhi oleh kesiapan infrastruktur dan kapasitas sumber daya manusia di tingkat desa.

Manfaat Penelitian

Penelitian ini memberikan manfaat teoritis dan praktis dalam bidang tata kelola pemerintahan berbasis digital. Secara teoritis, penelitian ini memperkaya kajian tentang evaluasi sistem informasi pemerintahan daerah, khususnya SIPD sebagai instrumen pengelolaan data pembangunan. Hasil penelitian ini juga dapat menjadi referensi bagi pengembangan konsep e-government di tingkat daerah yang menekankan pentingnya integrasi data lintas SKPD.

Secara praktis, penelitian ini memberikan masukan bagi pemerintah daerah Kabupaten Sidoarjo dalam memperbaiki implementasi SIPD, terutama dalam hal pemerataan akses informasi di seluruh desa. Selain itu, penelitian ini juga membantu pemerintah dalam mengidentifikasi kelemahan sistem, seperti kurang optimalnya aksesibilitas data dan kebutuhan peningkatan kapasitas aparatur desa. Dengan demikian, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai dasar perbaikan kebijakan agar SIPD lebih efektif dalam mendukung perencanaan pembangunan daerah yang berbasis data dan transparan.

Referensi

- [1] Nugroho dkk. (2023). EVALUASI RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH DENGAN PENDEKATAN CONTEXT, INPUT, PROSES, PRODUCT (CIPP) PADA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA. Publica: Jurnal Administrasi Pembangunan dan Kebijakan Publik Vol. 14 No. 1 Februari 2023
- [2] Ryas, M. (2021). EVALUASI PEMANFAATAN SISTEM INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH (SIPD) DENGAN MODEL CIPP DALAM MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANCE DI KABUPATEN ACEH TENGAH PROVINSI ACEH
- [3] Destania, S. (2021). EVALUASI KUALITAS PENERAPAN APLIKASI SISTEM INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH (SIPD) DI BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN
- [4] Zeber, A. (2023). EVALUASI PEMANFAATAN APLIKASI SISTEM INFORMASI PEMERINTA DAERAH (SIPD) DALAM SINKRONISASI PERENCANAAN DAN PENGANGGARAAN PEMBANGUNAN DI KOTA SUNGAI PENUH PROVINSI JAMBI
- [5] SKRIPSI. (2022). Revolusi industri 5.0 diperkenalkan oleh Negara Jepang
- [6] Mandraguna dkk. (2024). EVALUASI PENERAPAN APLIKASI SISTEM INFORMASI PEMERINTAH DAERAH (SIPD) DALAM PROSES PERENCANAAN DI SKPD DINAS KESEHATAN KABUPATEN BENGKULU TENGAH. Jurnal Mitra Rafflesia Volume 16 Nomor 2
- [7] Sari dkk. (2023). IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 70 TAHUN 2019 TENTANG SISTEM INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH (SIPD) DI KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR. Jurnal Hukum Uniaki, Vol. 12 No. 2

Referensi

- [8] Budi. (2021). EVALUASI PENERAPAN KUALITAS APLIKASI SIPD DI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN DAERAH KABUPATEN JENEPONTO. Volume 9
- [9] Sugesti dkk. (2025). Evaluation of the Local Government Information System (Sipd) in The Management of Bos Funds of the Berau Regency Education Office. Vol. 4, No. 7, 2025: 3611-3630
- [10] Anggraini & Supartiwi. (2024). EVALUASI PROGRAM TNI MANUNGGAL MEMBANGUN DESA DI DESA SLENGGUNG KECAMATAN BANJARMANGU KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2024. Vol. 1 No.2 pp. 115-138
- [11] Rafiqi dkk. (2022). Efektivitas Implementasi e-Budgeting dalam Mewujudkan Good Governance dengan Model CIPP (Studi Kasus pada Kota Surabaya). Vol. 1 No.2 pp. 115-138
- [12] Wurara dkk. (2020). IMPLEMENTASI SISTEM INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH KOTA MANADO. Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan Volume 2 No. 5 Tahun 2020
- [13] Putri dkk. (2025). EVALUASI PENERAPAN SISTEM INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH (SIPD) DALAM PELAKSANAAN LAPORAN KEUANGAN PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN PONOROGO. Vol. 5 No. 1 Februari 2025, hal., 110-118
- [14] Karundeng dkk. (2021). Implementasi Kebijakan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Sipd) Di Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian Dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro. Vol.1, No. 2, 2021
- [15] Setiawan dkk. (2023). Analisis Evaluasi Kualitas Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) Menggunakan ISO/IEC 25010 di BAPPEDA Provinsi Gorontalo. Volume 3, No. 1 Januari 2023

